

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press Jakarta.

Ashiddiqe, Jimly, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Darumurti, Krishna D dan Umbu Rauta, 2003, *Otonomi Daerah; Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Haris, Syamsuddin, 2007, *Desentralisasi & Otonomi Daerah Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Dearah*, Jakarta: LIPI Press.

Harun, Nuria Siswi Enggarani, Galang Taufani, 2018, *Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly*, Surakarta: Muhammadiyah University Press

Is, Muhamad Sadi, Kun Budianto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana.

Kaho, Josep Riwu, 2004, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Karianga, Hendra, 2017, *Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, Depok: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenanhan*, Jakarta: Grasindo

Sabarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Syafii, Inu Kencana, 2009, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: Bumi Aksara.

Wahidin, Samsul, 2014, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widjaja, Haw, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*, Jakarta: RajaGrafindo Perasda.

Wijayanti, Septi Nur, Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara; Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

### **Jurnal**

Guyanie, Gugun El, 2015, “Politik Hukum Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Desentralisasi”, *Jurnal In Right*, Volume 5.

Hariyanto, 2020, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Volksgeist*, Volume 3.

Hidayat, Syarif, 2018, “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation”, *Jurnal Positivistik*, Volume 1.

Kusriyah, Sri, 2016, “Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III.

Mahmuzar, 2020, “Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50.

Mariana, Dede, 2010 “Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Governance*, Volume 1.

Muin, Fatkhul, 2014, “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Permerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Volume 8 Nomor 1.

Nadir, Sakinah, 2013, “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1.

Najidah, Warkhatun, 2010, “Menata Kembali Desentralisasi Indonesia Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Jurnal Yuriska*, Volume 2.

Pitono, Andi, 2012, "Asas Dekonsentrai dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Kebijakan Publik", Volume 3.

Salim, Wilmar, Siwage Dharma Negara, "Infrastructure Development under the Jokowi Administration: Progress, Challenges and Policies", *Journal of Southeast Asian Economies*. Volume 35.

Setiadi, Wicipto, Ali Imran Nasution, 2019, "Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional (Administrative Sanctions for Regional Heads who Do Not Perform National Strategic Programs)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 4.

Simandjuntak, Reynold, 2015, "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", *Jurnal Syariah dan Hukum De Jure*, Volume 7.

Sofian, Hari, 2019, "Kewenangan Presiden Dalam Proses Penyidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Widodo, Ismu Gunadi, 2011, "Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 2.

### **Internet**

Agus Saputra, "Bentuk Negara Kesatuan atau Unitaris", Makalah OSF Preprints, dalam <https://doi.org/10.31219/osf.io/cxdp2>, diakses 24 April 2022.

Bisnis.com, 2020, "Jokowi Tetapkan 10 Program Strategis Nasional, Apa Saja Ya?", dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201127/9/1323386/jokowi-tetapkan-10-program-strategis-nasional-apa-saja-ya>, diakses pada Jum'at, 8 Oktober 2021.

Wikipedia, 2021, "Proyek Strategis Nasional", dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Proyek\\_Strategis\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Proyek_Strategis_Nasional), diakses Jum'at, 8 Oktober 2021.

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional